

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DALAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
PADA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

MUHAMMAD AZHARI
NIM: 217120149

**PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI ENTREPRENEUR**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

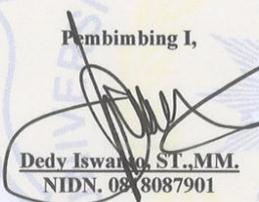
**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
PADA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Telah memenuhi syarat dan disetujui:

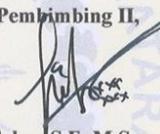
Tanggal 19 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dedy Iswara, ST.,MM.
NIDN. 0818087901

Pembimbing II,


Selva, S.E.,M.Sc.
NIDN. 0811118601

Mengetahui,

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Prodi,


Lata Hendra Maniza, S.Sos.,M.M.
NIDN: 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
PADA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh:

Muhammad Azhari
NIM. 217120149

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal, 14 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim penguji:

1. **Dedy Iswanto, ST., MM.** (PU)
NIDN. 0818087901
2. **Selva, SE., M.Sc.** (PU)
NIDN. 0811118601
3. **Abdul Hafiz, S.Sos., M.Pd.I.** (PN)
NIDN. 0810097105

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis

Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M.
NIDN. 0828108404

Mengesahkan,
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas muhammadiyah mataram
Dekan.

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 21 Juli 2021

Mahasiswa,



Muhammad Azhari
NIM. 217120149



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AZHARI
NIM : 217 120 149
Tempat/Tgl Lahir : Lendang Batu - 10-07-1999
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : PISIPOL
No. Hp : 081 916 715 653
Email : AZHARIART@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil
Menengah Pada Kabupaten Lombok Timur

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. U82

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 September 2021

Penulis



Muhammad AZHARI
NIM. 217 120 149

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

K

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AZHARI
NIM : 217 120 149
Tempat/Tgl lahir : Lendang BATU - 10 - 07 - 1999
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081 946 713 633
Jenis Penelitian : [X] Skripsi [] KTI [] Tesis []

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengoleksinya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah pada Kabupaten Lombok Timur

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 - September 2021
Penulis



Muhammad AZHARI
NIM. 217 120 149

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

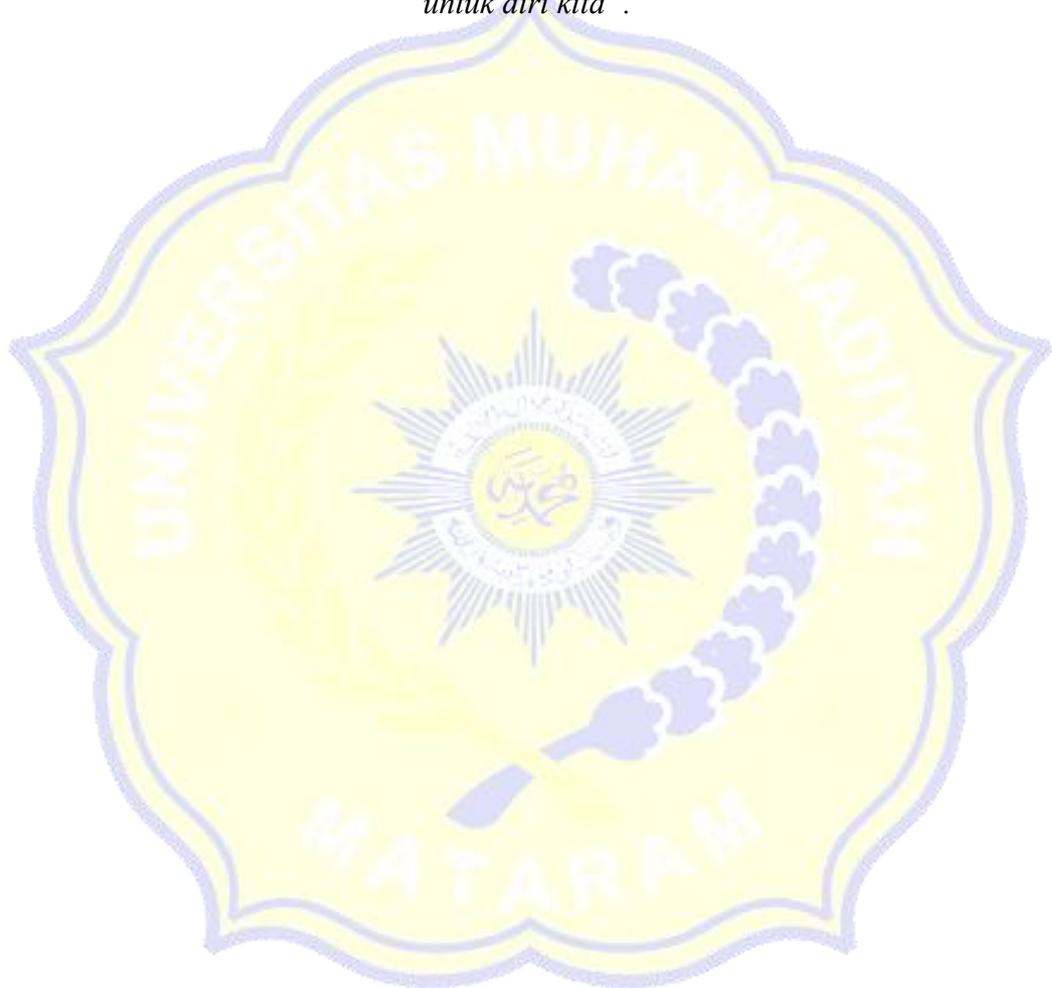


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Hidup adalah proses, tak ada keberhasilan tanpa proses, tak ada proses yang tanpa kegagalan, jangan jadikan kegagalan sebagai obsesi dan ambisi tetapi jadikanlah kegagalan sebagai motivasi”.

“Setiap tantangan merupakan kesempatan untuk mengenal siapa diri kita dan untuk diri kita”.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah pada Kabupaten Lombok Timur”**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB).

Penyusun menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Besar harapan penyusun akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhirnya Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi pembaca sekalian.

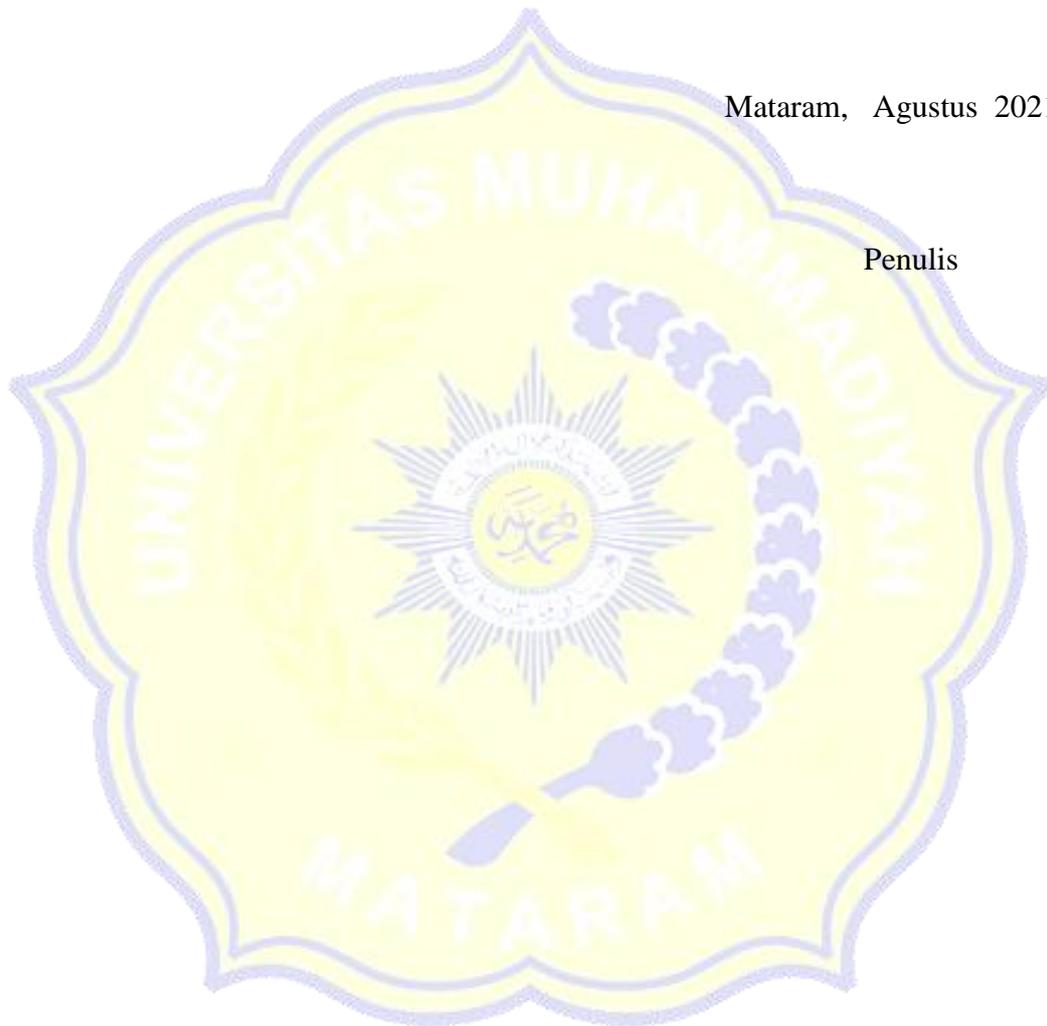
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu terutama kepada;

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,M.M Selaku Ketua Pogram Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E.,M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dedy Iswanto, ST.,MM. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan baik hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Selva, SE.,M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan baik hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Orang tua yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Mataram, Agustus 2021

Penulis



Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah pada Kabupaten Lombok Timur. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Muhammad Azhari¹, Dedy Iswanto, ST.,MM², Selva, SE.,M.Sc³.
Abdul Hafiz, S.Sos..M.Pd.I⁴.

Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³, Pembimbing Netral⁴

Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mtaram

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) perlu dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian di dalam penelitian ini terletak pada peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Timur. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara narasumber dan dokumen-dokumen mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, diketahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Timur. Peranan Dinas Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam pembinaan dan pengembangan IKM bertujuan agar IKM menjadi kuat dan tidak gampang mati sehingga sektor industri tumbuh dan sektor ekonomi dapat berkembang mengingat peran Industri Kecil Menengah (IKM) cukup besar terutama untuk penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Lombok Timur yaitu pada kegiatan pelatihan, promosi, dan *monitoring*.

Kata Kunci: Pembinaan dan Pengembangan, Industri Kecil Menengah.

The Department of Industry and Trade's Role in the Development and Guidance of Small and Medium Enterprises in East Lombok Regency. A Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram

Muhammad Azhari¹, Dedy Iswanto, ST. MM², Selva, SE. M.Sc³.
Abdul Hafiz, S.Sos.M.Pd.I⁴.
Student¹, Main Advisor², Companion Advisor³, Neutral Examiner⁴

Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study explains how local governments, particularly the East Lombok Regency's Industry and Trade Office, should guide and grow Small and Medium Industries (IKM). The research method utilized to prepare this thesis is a sort of qualitative descriptive research. The function of the East Lombok Regency Industry and Trade Office in promoting and developing Small and Medium Industries (IKM) in East Lombok Regency is the subject of this study. Primary and secondary data were employed as data sources. Data gathering, data reduction, data presentation, and drawing conclusions are the methods utilized to analyze the research data.

According to the results obtained from interviewees and documents regarding the East Lombok Regency Industry and Trade Office, it is known the role of the East Lombok Regency Industry and Trade Office in fostering and developing Small and Medium Industries (IKM) in East Lombok Regency. The East Lombok Regency Industry and Trade Office's role in cultivating and expanding IKM seeks to make IKM robust and not easily die so that the industrial sector grows and the economic sector develops, given the importance of Small and Medium Industries (IKM) for employment and community revenue. The East Lombok Regency Industry and Trade Office is responsible for training, promotion, and monitoring activities related to IKM in East Lombok Regency.

Keywords: *Guidance and Development, Small and Medium Industry.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PLAGIARIME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoretis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teori	9
2.2.1 Peranan.....	9
2.2.2 Pengertian Pemerintah Daerah.....	10
2.2.3 Peranan Pemerintah Daerah	11
2.2.4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Pengembangan ..	16
2.2.5 Pembinaan dan Pengembangan.....	19
2.2.6 Industri Kecil Menengah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Tahap-Tahap Analisa Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.....	35
4.1.3 Struktur Organisasi	36
4.1.4 Sumber Daya Manusia.....	36
4.1.5 Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah pada Kabupaten Lombok Timur	39
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah pada Kabupaten Lombok Timur	51
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pencapaian Tujuan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).....	34
--	----



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada Bapak Burhanuddin dan Ibu Mahnim beserta keluarga yang senantiasa memberi motivasi, dukungan dan berjuang tanpa kenal lelah. Terimakasih atas segala dukungan serta do'a yang tiada henti untuk penulis.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri ini adalah kegiatan ekonomi yang menangani bahan baku, bahan baku, produk semi-jadi atau produk jadi dalam komoditas berkualitas tinggi, termasuk kegiatan desain dan teknologi industri. Hal ini juga membuktikan bahwa UKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang kuat dan tangguh. Diharapkan ke depan, usaha kecil dan menengah mampu beradaptasi dengan lingkungan ekonomi yang berubah dengan cepat, tidak hanya untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka di pasar lokal, tetapi juga untuk mempromosikan kegiatan ekspor, sehingga mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia. UKM berperan dalam memperkuat perekonomian. Pelaku ekonomi Indonesia didominasi oleh usaha kecil dan menengah, terutama di sektor industri. Usaha kecil dan menengah adalah usaha kecil dan menengah di bidang industri manufaktur. Menurut UU UKM No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590 Tahun 1999, klasifikasi UKM berbeda. Dapat disimpulkan bahwa UKM adalah UKM.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan

dan/atau satu badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (50 juta rupiah) sampai dengan 1. Jumlahnya paling banyak Rp500.000.000,00 (500 juta rupiah), tidak termasuk tanah yang digunakan untuk membangun kantor; atau penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (300 juta rupiah), sampai dengan 2.500 juta rupiah (2,5 miliar rupiah). Usaha Menengah adalah perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau satu badan ekonomi dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (500 juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.0000.000.000.000,00 (100 miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan. . Atau omzet tahunan melebihi 2,5 miliar rupee (2,5 miliar rupee), hingga 500 miliar rupee (500 miliar rupee). Pada saat yang sama, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengumumkan dalam Keputusan No. 590 Tahun 1999 bahwa industri kecil adalah berbagai industri dengan total investasi komersial sampai dengan 200 juta rupee (200 juta rupee), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tujuan komersial. . Perusahaan menengah. Industri-industri tersebut adalah yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp200.000.000 (Rp200 juta) sampai Rp5.000.000.000 (Rp5 miliar). Menurut pernyataan ini, UKM dapat diklasifikasikan menurut nilai investasinya.

Singkatnya, banyak usaha kecil dan menengah telah berkembang dan tumbuh di ekonomi dan masyarakat menengah dan rendah, dan banyak usaha kecil dan menengah juga telah berkembang dan tumbuh di ekonomi dan masyarakat tingkat menengah dan tinggi. Ini mungkin karena industri

kecil dan menengah membutuhkan modal yang relatif kecil untuk dioperasikan oleh individu. Semakin banyak industri kecil dan menengah yang tumbuh dan berkembang, menjadikan industri kecil dan menengah sebagai salah satu sektor perekonomian Indonesia. Sektor ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan karena dipandang sebagai seperangkat bidang usaha yang perlu dimasukkan ke dalam dunia usaha di tingkat nasional untuk meningkatkan taraf hidup dan daya saing usaha di masa depan.

Perhatian pemerintah dan pengembangan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk meningkatkan potensi daerah dan mempercepat fleksibilitas dan kemandirian pembangunan daerah. Harus ada kebijakan pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan UKM. Pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia mempengaruhi kemampuan kreativitas dan inovasi pengembangan produk untuk bersaing di pasar dunia. Selain menjalin hubungan antara pemilik usaha besar dan kecil serta peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerintah harus terus memperkuat peran usaha kecil dan menengah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengelolaan daerah dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan daerah. Pasal 14 UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa urusan pemerintahan kabupaten atau kota terpilih meliputi urusan pemerintahan yang benar-benar ada dan

dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat karena kondisi, karakteristik, dan potensi unggulan daerah. cemas. Urusan pemerintahan meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertahanan negara, lingkungan hidup, perkoperasian, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal dan tenaga kerja. Atas dasar ini, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan potensi daerah, termasuk usaha kecil dan menengah.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten kabupaten dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Fasilitas pendidikan cukup lengkap. Menurut Perda No. 32 Tahun 2004, UKM merupakan salah satu potensi strategis daerah. Sinergi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia akan mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah yang kreatif dan inovatif pada masa pemerintahan Tong Lombok. Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah di Lombok Timur membuktikan hal tersebut. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro, pemerintah daerah, i. H. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitas, nasehat, bimbingan, dan lain-lain. Di pemerintah Lombok Timur.

Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan UKM adalah departemen industri dan komersial pemerintah Lombok Timur. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memainkan peran sentral dalam mempromosikan industri kecil dan menengah di Lombok Timur dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, saran,

dan dukungan lainnya. Salah satu rekomendasi dan tujuan pengembangan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur adalah membantu UKM bersaing.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memberikan konsultasi dan pengembangan bagi UKM melalui penyelenggaraan kursus pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk menjadikan sumber daya manusia lebih inovatif dan kreatif. Menurut Dessler (2009:263), pelatihan adalah proses mengajar karyawan baru atau yang sudah ada keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Dalam konteks usaha kecil dan menengah tersebut di atas yang berperan penting bagi pemerintah, penulis tertarik untuk mengembangkan "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. -perusahaan besar di Lombok Timur".

1.2 Rumusan Masalah

Menurut hasil yang dijelaskan di atas, masalah penelitian dapat ditentukan, yaitu, peran Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Mengembangkan dan Mengembangkan Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam Peraturan Direktori Donglong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dunia usaha dalam memajukan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Memperdalam pemahaman tentang peran industri dan perdagangan dalam penciptaan dan pengembangan UKM di Lombok Timur.
2. Biarkan pembaca memiliki pemahaman mendalam tentang peran industri dan perdagangan dalam pengembangan dan pertumbuhan UKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Biarkan penulis memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran layanan bisnis dalam pengembangan dan pertumbuhan UKM.
2. Bagi civitas akademika Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk membantu civitas akademika memahami peran industri dan perdagangan dalam pengembangan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan masalah dalam konstruksi.
3. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur Hasil kajian ini dapat dijadikan masukan bagi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur yang fokus pada promosi dan pengembangan industri kecil dan menengah. : Tahun ini lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Yang Relevan

Penelitian terkait, atau sering disebut sebagai ringkasan singkat dari karya-karya sebelumnya tentang suatu topik atau topik terkait, adalah mencari (teknologi terbaru) untuk menjelaskan perbedaan, atau menggunakan penelitian yang ada untuk memperkuat hasil penelitian. Beberapa penelitian terkait sebelumnya tercantum di bawah ini:

1. Penelitian Yudi Jas Darma (2015) berjudul “Peran Industri Jasa, Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Investasi dalam Menumbuhkan Peserta Industri Kecil Menengah di Kota Tanjung Pinang”. Kantor perdagangan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Industri Kreatif dan Penanaman Modal sebagai instansi pemerintah yang berperan dalam perlindungan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Tanjung Pinang menyediakan wadah untuk menerima saran Untuk perbaikan Perusahaan membutuhkan masyarakat khususnya pelaku UKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami peran Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Industri Kreatif dan Investasi dalam pengembangan pelaku industri kecil dan menengah di Kota Tanjung Pinang. Informan dalam penelitian ini adalah satu orang pegawai Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Industri Kreatif dan Investasi

Kota Tanjung Pinang yang tanggung jawab dan fungsinya utama di bidang UKM, kemudian tiga orang dipekerjakan oleh pelaku ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah peran Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Industri Kreatif dan Investasi dalam penyelenggaraan industri kecil dan menengah di Kota Tanjung Pinang kurang berperan. Hal ini terlihat dari minimnya penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi yang diberikan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Industri Kreatif dan Investasi kepada para pengusaha IKM. Tidak hanya itu, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Industri Kreatif dan Investasi tidak merespon memberikan pembinaan bagi IKM, yang juga terlihat dari kurangnya respon dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Industri Kreatif dan Investasi dalam menyelesaikan permasalahan. IKM. Masalah Kota Tanjung Pinang.

2. Candra Arista Pradra (2014), judul "Industri dan Perdagangan Kantor adalah produk dari produk kepemimpinan regional, di bidang produk kepemimpinan regional, di wilayah wilayah Kabupaten Mojokerto dan wilayah perdagangan. Hambatan pengembangan perdagangan perak adalah harga bahan baku yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang buruk, dan kurangnya dana.
3. Penelitian Lianda Subekti (2013) yang berjudul "Implementasi Strategi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan KMU, Kajian Pada Dinas Koperasi dan KMU Kota Malang". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan

data dilakukan melalui wawancara, observasi dan pencatatan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang menerapkan strategi memajukan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, mengutamakan keunggulan, menangkap peluang keberhasilan, menangkap peluang mengurangi kerugian, menahan ancaman dan mengurangi kerugian. Memajukan dan mengembangkan koperasi dan usaha, serta menghindari usaha kecil dan menengah Ancaman terhadap pembangunan. Akibat perubahan situasi aktual di daerah, pelaksanaan strategi pembiayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM Kota Malang belum berjalan mulus.

2.2 Kajian Teori

2.2.7 Peranan

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kata peran memiliki makna ganda, sementara mendefinisikan peran sebagai bagian dari tugas yang ada, begitu pula harapan warga sosial terhadapnya. Selain itu, peran didasarkan pada Soekanto (2009: 213): “Peran adalah proses dinamis kedudukan (keadaan). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, mereka memainkan peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan terletak dalam sains. Menurut Levinson (Soekanto, 2009: 213), peran meliputi tiga hal:

- a) Peran mengandung norma tentang status atau status seorang individu dalam masyarakat.

- b) Kelahiran Dalam pengertian ini, peran adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Peran lahir adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Pengaruh
- c) derajat Celsius derajat Celsius juga dapat digambarkan sebagai perilaku pribadi yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- d) Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam peran ini, seorang individu atau kelompok memikul banyak tanggung jawab sesuai dengan peran mereka.

2.2.8 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 14 UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan Partai Demokrat sesuai dengan prinsip otonomi dan pengelolaan bersama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dimungkinkan dalam sistem dan prinsip nasional. Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kekuasaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, pemberdayaan dan peran, dan daya saing daerah untuk mempercepat terwujudnya kepentingan bersama. Memperhatikan asas demokrasi, keadilan,

kewajaran dan keistimewaan, serta memperhatikan ciri-ciri suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan

2.2.9 Peranan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pasal 25 Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh dewan daerah;
2. Menyerahkan Rancangan Perda;
3. Merumuskan Perda yang disetujui bersama DPRD;
4. Merumuskan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja daerah, melaporkan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas dan diputuskan bersama;
5. Kerja sulit untuk melaksanakan komitmen regional;
6. Yurisdiksi yudisial dan non-yudisial Perwakilan hak dapat menunjuk perwakilan hukum untuk mewakili mereka, dan
7. Menjalankan tugas dan wewenang hukum lainnya.

Menurut Pasal 26(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, wakil bupati mempunyai tugas atau tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

1. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan vertikal daerah. lembaga dan mengikuti laporan badan pengatur Dan/atau hasil survei, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta berupaya mengembangkan dan memelihara sosial budaya dan lingkungan.
2. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dewan kabupaten dan kota oleh wakil gubernur.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan administrasi wakil walikota dari komite lingkungan, lingkungan dan/atau desa.
4. Saran dan refleksi para pemimpin daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.
5. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh walikota dan
6. Ketika manajer departemen dinonaktifkan,
7. Lakukan tugas dan wewenang manajer departemen.

Organisasi daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengawasan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Wilayah, Sarana Teknis Daerah, Jalan-jalan dan Desa-desa dalam Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki peran atau tanggung jawab dan fungsinya masing-masing, yaitu:

1. Sekretariat Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban membantu direktur/walikota dalam merumuskan pedoman dan

mengkoordinasikan daerah, kantor urusan dan fasilitas teknis. Fungsi sekretariat daerah adalah:

1. merumuskan kebijakan pemerintah daerah
 2. mengkoordinasikan dinas dan dinas khusus daerah untuk menyelesaikan tugas
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 4. pengembangan pemerintah daerah dan kelembagaan; dan
 5. Tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota beserta tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan sekretariat, mendukung tugas dan fungsi Panitia Pembangunan Demokrat, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Panitia Pembangunan Demokrat. Kapasitas keuangan daerah. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a) ketua sekretariat DPRD;
 - b) pelaksanaan pengelolaan keuangan DVDD;
 - c) menyelenggarakan rapat DPRD;
 - d) menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.
3. Tugas badan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten (kota), pelaksanaan perintah pelaksanaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa. Badan pengawasan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) pengawasan program a)
- b) merumuskan pedoman dan mempromosikan pengawasan
- c) tanggung jawab pengawasan inspeksi, penyelidikan, review dan evaluasi.

4. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Nasional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) pengembangan konsep rencana teknis;
- b) rencana pembangunan terkoordinasi;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang; tanggung jawab lainnya.

5. Sesuai dengan asas otonomi, setiap pemerintahan kabupaten mengemban tugas dan tugas pembantuan dalam menangani urusan pemerintahan kabupaten. Kantor wilayah mempunyai fungsi: merumuskan kebijakan departemen sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan tanggung jawabnya;
- b) membimbing dan melaksanakan tugas sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya; dan

- c) melaksanakan bupati/walikota sesuai dengan tanggung jawabnya dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh fungsi.
- 1) Tugas lembaga profesi daerah adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan khusus daerah. Badan spesialis daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) merumuskan kebijakan spesialis sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - b) membantu pengurusan perangkat daerah sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - c) membimbing dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
 - d) Bupati/Kota melaksanakan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Jalan adalah wilayah kerja yang dikomandani oleh pimpinan jalan, sebagai organisasi wilayah kabupaten dan kota. Camat bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh bupati/walikota dan mengurus sebagian urusan otonomi daerah.
- 3) Kelurahan adalah wilayah kerja yang dikelola oleh Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kabupaten. Tugas dan fungsi Lurah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ungkapan di atas dapat diringkas sebagai peran atau tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah yang terperinci. Menurut Smith

dalam (Muluk, 2009: 111), peran pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari serangan dan gangguan dari masyarakat lain, dan untuk melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya sebanyak mungkin. , dan Merupakan tanggung jawab untuk melindungi setiap anggota komunitas dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota komunitas lainnya. Pemahaman ini merupakan pemahaman klasik pemerintah yang banyak digunakan dalam literatur.

2.2.10 Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan

Bahkan, banyak organisasi yang terlibat dalam promosi dan pengembangan UKM. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah memiliki potensi yang cukup untuk promosi dan pengembangan. Menurut Iwantono (2003:12), pembinaan biasanya dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil atau didukung oleh koperasi. Bentuk pembinaan lebih menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penyuluhan, kewirausahaan, pengembangan ekonomi perempuan pengusaha, program peningkatan pendapatan keluarga, pembinaan kelompok, koperasi perempuan dan asosiasi perempuan pengusaha, dan program pengentasan kemiskinan lainnya.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro. Selain pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memajukan dan mengembangkan industri kecil dan menengah. Mengharuskan pemerintah

daerah untuk menyediakan fasilitas pembangunan, terutama di bidang-bidang berikut:

1) Produksi dan pengolahan oleh:

- a. Meningkatkan keterampilan manajemen dan teknologi produksi dan pengolahan;
- b. geb. Mempermudah pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan pengemasan; dan
- c. Mempromosikan penerapan standardisasi dalam proses manufaktur.

2) Cara pemasaran:

- a. Melakukan survei dan evaluasi pasar;
- b. Lahir untuk menyebarkan informasi pasar;
- c. Derajat Celcius untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan keterampilan pemasaran;
- d. Hari untuk menyediakan fasilitas pemasaran, termasuk uji coba pasar, agen pemasaran, penyedia dan promosi bisnis;
- e. Msalnya Memberikan dukungan untuk promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi, dan
- f. Menyediakan konsultan pemasaran yang profesional.

3) Sumber daya manusia, yaitu lulus:

- a. Mempromosikan dan menumbuhkan jiwa wirausaha;
- b. Kelahiran Meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen;
- c. Derajat Celcius Mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan,

konsultasi, motivasi dan kreativitas kewirausahaan, serta membentuk wirausaha baru.

4) Desain dan teknologi, dari:

- a. Meningkatkan keterampilan desain dan teknis;
- b. kelahiran untuk meningkatkan kerjasama dan transfer teknologi;
- c. derajat Celcius untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. hari. Memberikan insentif bagi mereka yang mengembangkan teknologi dan melindungi lingkungan, dan
- e. Mendorong memperoleh sertifikat kekayaan intelektual.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan, yaitu: 4.444 usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikembangkan oleh:

- a. Pendataan dan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
- b. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan berdasarkan potensi dan masalah yang dihadapi;
- c. Pelaksanaan rencana pembinaan dan pengembangan; dan
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro dilaksanakan melalui jalur:

- 1) Koperasi;
- 2) Sentra;

3) Gugus; dan

4) Kelompok.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memberikan kemudahan dalam jangka waktu tertentu. Lamanya waktu tergantung pada klasifikasi dan tingkat perkembangan industri kecil dan menengah. Klasifikasi dan klasifikasi status pembangunan meliputi:

1) Kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;

2) Menentukan klasifikasi;

3) Jalur pengembangan;

4) Bentuk fasilitas; dan

5) Periode peninjauan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa peran pemerintah daerah dalam pemajuan dan pembangunan sangat penting dan terdepan. Meskipun banyak juga lembaga swadaya masyarakat yang terlibat, pemajuan dan pengembangan usaha kecil dan mikro masih menjadi tugas utama pemerintah daerah.

2.2.11 Pembinaan dan Pengembangan

1. Pengertian Pembinaan

Coaching berasal dari kata “bina” menurut kamus besar bahasa Indonesia. Coaching berarti pemutakhiran, prosedur atau tindakan yang harus dijalankan secara efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik. Menurut Poerwadarminta (2006:182), Pembina melakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap,

dan kemampuan subjek melalui tindakan bimbingan dan pemantauan untuk mencapai tujuan. Menurut Miftah Thoha (2008:7), Coaching juga menulis:

“Suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini berarti kemajuan, perbaikan, pertumbuhan, berbagai kemungkinan Perkembangan sesuatu, pengembangan atau peningkatan sesuatu Pengertian ini memiliki dua unsur, yaitu pelatih itu sendiri dapat disamakan dengan tindakan, proses atau masalah tujuan, dan kedua, pelatih dapat mengungkapkan “perbaikan” dari “sesuatu”.

Dapat dilihat dari beberapa uraian tersebut bahwa terdapat kegiatan pengembangan dan peningkatan serta penemuan hal-hal baru dalam kegiatan pembinaan. Dapat dipahami bahwa pengembangan IKM adalah untuk memberikan arahan, arahan dan motivasi bagi IKM yang ada melalui pembaharuan, pengawasan dan pengawasan, sehingga mencapai kondisi yang lebih baik.

2. Pengembangan

Menurut perkembangan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan upaya peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan uraian Undang-Undang Usaha Kecil, Menengah dan Mikro No. 20 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pembangunan adalah pemajuan pertumbuhan, kemampuan dan daya saing usaha kecil, menengah dan mikro melalui pemberian fasilitas yang ditingkatkan,

konsultasi, bantuan dan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat meningkat.

3. Tujuan Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Mikro, dan Usaha Menengah mengatur bahwa tujuan industri kecil dan menengah dan usaha kecil dan menengah adalah untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dalam rangka mewujudkan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. IKM juga memiliki target otorisasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Usaha Kecil, Menengah dan Mikro No. 20 Tahun 2008, yaitu:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, maju dan berkeadilan;
- b) lahir untuk memperkuat dan mengembangkan kemampuan usaha kecil, menengah, dan mikro menjadi usaha mandiri; dan
- c) Memperkuat peran usaha kecil, menengah dan mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Tentunya karya

SMI ini juga memiliki tujuan internal. Tujuan internal SMI didasarkan pada visi dan misi perusahaan. Secara umum, tujuan internal IKM dalam kegiatannya tentu saja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan lingkungan yang sejahtera.

2.2.12 Industri Kecil dan Menengah (IKM)

UKM dapat digolongkan sebagai UKM karena merupakan UKM yang bergerak di bidang industri manufaktur. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM bertanggung jawab atas UKM. Tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Perdagangan adalah merumuskan dan melaksanakan pedoman, termasuk melakukan penyuluhan dan rencana pengembangan.

UKM dan UKM memiliki arti yang berbeda, tetapi mereka terkait. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa usaha kecil adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan, dengan kekayaan bersih melebihi Rp50.000.000,00 (50 juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 rupiah (500 juta rupiah), tidak ada tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha; atau omset tahunan lebih dari 300.000.000,00 (300 juta rupiah), sampai dengan 2.500.000.000 rupiah (2,5 miliar rupiah). Usaha Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan, dengan kekayaan bersih melebihi Rp500.000.000,00 (Rp500 juta), sampai dengan Rp10.000.000.000.000.000.000,00 (Rp10 miliar), dan tidak digunakan untuk kegiatan usaha. bangunan gedung; atau penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (Rp 2,5 miliar), sampai dengan Rp 500.000.000 (Rp 50 miliar). Pada saat yang sama, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999 mengumumkan bahwa industri kecil

adalah semua jenis industri dengan total nilai investasi sampai dengan 200.000.000 rupiah (200 juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha. dan industri menengah mengacu pada total nilai investasi perusahaan Nilai investasi dari Rp200.000.000,00 (200 juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (50 miliar rupiah) pada semua jenis industri. Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa penggolongan industri kecil dan menengah dalam UU Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999 hanya didasarkan pada nilai investasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berbagai metode dapat digunakan untuk memberikan pedoman kepada peneliti untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2004:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan metode analisis yang tidak menggunakan metode analisis statistik atau metode kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif memiliki banyak ciri yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya. Menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2004: 9), salah satu cirinya adalah

“Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu observasi, wawancara, atau telaah dokumen.” Ada beberapa alasan untuk menggunakan metode kualitatif ini. Pertama, ketika banyak realitas yang terlibat, lebih mudah untuk mengadopsi pendekatan kualitatif. Kedua, metode ini secara langsung menunjukkan sifat hubungan antara peneliti dan orang yang diwawancarai. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan lebih dapat beradaptasi dengan banyak pengaruh umum yang lebih tajam pada model nilai yang dihadapi.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dialami peneliti dari segi

kata-kata dan bahasa.

Menurut metode kualitatif Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2004:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Hal ini disebabkan penggunaan metode kualitatif. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, apa, dan bagaimana selalu digunakan oleh peneliti. Menurut pemahaman ini. Konsisten dengan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi deskriptif metode kualitatif adalah studi tentang gambaran yang sistematis, benar, akurat dan jelas tentang satu atau lebih peristiwa. Oleh karena itu, sangat tepat menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji topik “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan UKM”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur di Jln. Profesor Soepomo No. 5 Selong Lombok Timur. Alasan mengapa peneliti harus memilih lokasi penelitian ini didasarkan pada kemudahan memperoleh informasi tentang lokasi peneliti di Lombok Timur..

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang dibutuhkan yang dapat diperoleh. Kumpulkan semua data yang diperoleh, kemudian tarik kesimpulan, yang akan menjadi hasil akhir penelitian. Ada dua jenis

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi di dan dekat lokasi penelitian. Kegiatan ini merupakan kombinasi dari mendengarkan, melihat dan bertanya. Sumber data utama yang dimaksud adalah :

- a) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
- b) Lombok Timur, kepala pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.
- c) teknisi lahir di bidang pembinaan dan pengembangan UKM di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur. Pelaku IKM di Lombok Timur pada derajat Celcius.

Pemilihan pihak-pihak tersebut ditentukan dengan memilih orang atau informan yang diyakini lebih memahami perkembangan ICM dan memiliki informasi yang akurat sebagai informan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data bekas diperoleh dengan menggunakan teknologi dokumen. Hal ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari informan tertulis atau gambar yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Data pelengkap dalam penelitian ini adalah dokumen resmi, catatan, dan laporan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Lombok Timur, yang dapat memberikan informasi tentang masalah penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi kualitatif, penulis melakukan wawancara dan pencatatan (Sugiyono, 2012: 136). Ada beberapa alat dalam pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti diartikan sebagai memusatkan perhatian pada suatu peristiwa, gejala, atau sesuatu. Peneliti fokus pada apa yang sedang dipelajari ketika penelitian selesai. Dibutuhkan observasi untuk memahami proses wawancara. Hasil wawancara perlu dipahami dalam hubungannya dengan konteks, observasi partisipan, perilaku partisipan selama wawancara, interaksi partisipan dengan peneliti, dan cara pandang partisipan. peristiwa yang diamati.

Pengamatan yang digunakan peneliti dibedakan menjadi pengamatan sistematis dan pengamatan nonsistematis, di antaranya pengamatan sistematis adalah pengamatan yang dirancang secara sistematis untuk isi, waktu, dan lokasi pengamatan.

Pengamatan non-sistematis yang digunakan peneliti juga berarti bahwa pengamatan yang diamati tidak disusun secara sistematis. Hal ini terjadi karena peneliti tidak mengetahui secara pasti apa yang

sedang diamati. Peneliti melakukan observasi berdasarkan data yang dibutuhkan.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah penelitian dan teknologi khusus yang memperoleh data melalui tanya jawab, jika tidak, ia mengajukan pertanyaan untuk tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan pasti informasi apa yang telah mereka terima. Dalam arti, peneliti atau pengumpul data menyiapkan alat berupa pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti. Peneliti juga dapat menggunakan peralatan bantu berupa handphone, kamera, dan gambar. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara:

- a. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- b. Teknisi kelahiran Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur untuk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
- c. Derajat Celcius Tujuh peserta industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditampilkan kepada objek penelitian; H. Peneliti dapat mengumpulkan data yang tidak diketahui oleh subjek penelitian tetapi disediakan dalam bentuk dokumen. File adalah semacam catatan tertulis. Isinya adalah pernyataan tertulis yang disiapkan oleh individu atau organisasi untuk meninjau suatu peristiwa. Berguna untuk memeriksa sumber data, bukti, informasi alam yang sulit diakses, dan peluang untuk memperluas pengetahuan .

Dokumen yang dikumpulkan peneliti tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dapat berupa gambar yang diterima peneliti dalam proses data mining. Kemudian informasi dari orang tertentu, hanya orang itu yang tahu.

3.5 Tahap-Tahap Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Analisis data Bogdan (dalam Sugiyono 2012: 136) adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu.

H. Menganalisis data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992:16), analisis terdiri dari tiga aliran kegiatan yang simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/validasi. Informasi rinci tentang tiga baris adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di tempat. Selama proyek berorientasi penelitian kualitatif terjadi, reduksi data akan terus berlanjut. Ketika peneliti memutuskan (biasanya tidak tahu) kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, dan metode pengumpulan data yang akan dipilih, harapan reduksi data menjadi jelas. Tingkat reduksi berikutnya terjadi ketika mengumpulkan data (meringkas, mengkode, mencari topik, membuat cluster, membuat partisi, membuat memo). Reduksi/konversi data ini berlanjut setelah studi lapangan hingga laporan akhir yang lengkap dihasilkan.

Reduksi data adalah bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, memandu, dan membuang data yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir.

Peneliti tidak perlu menafsirkan reduksi data sebagai kualifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, yaitu: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, melalui klasifikasi pola yang lebih luas, dan

sebagainya. Terkadang juga memungkinkan untuk mengubah data menjadi angka atau peringkat, tetapi ini tidak selalu masuk akal.

2. Penyajian data

Miles dan Huberman (1992: 17) membatasi penyajian pada kumpulan informasi yang terorganisir, memberikan peluang untuk kesimpulan dan tindakan. Mereka percaya bahwa presentasi yang lebih baik adalah alat penting untuk analisis kualitatif yang efektif, termasuk: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Mereka dirancang untuk menggabungkan informasi terorganisir dalam bentuk yang kohesif dan mudah diakses. Hal ini memungkinkan analisis untuk memahami apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau melanjutkan analisis yang membuat presentasi bermanfaat.

3. Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, kesimpulan hanyalah bagian dari aktivitas dalam konfigurasi keseluruhan. Kesimpulan ini juga ditinjau selama penelitian. Tinjauan bisa sesingkat pemikiran ulang yang ditulis oleh analisis (peneliti), meninjau catatan di tempat, atau bisa menyeluruh dan membosankan melalui peer review dan brainstorming untuk mencapai kesepakatan antar-subjek atau upaya lain. Masukkan salinan yang ditemukan ke dalam kumpulan data lain. Singkatnya, kebenaran, kekokohan, dan penerapan makna yang muncul dari data lain harus diuji, yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya ditarik selama proses

pengumpulan data, tetapi juga perlu diverifikasi sebelum dapat dipertimbangkan.

